

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis hasil penelitian pada bagian pembahasan, maka penulis dapat menyimpulkan mengenai Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Kasihan II Tahun 2016-2017 dilihat dari implementasi program JKN yang diukur dengan indikator implementasi kebijakan yaitu sebagai berikut:

1. Komunikasi

Dalam kegiatan implementasi, komunikasi sangat diperlukan apalagi pada awal program dijalankan. Sosialisasi mengenai program JKN ini sudah dilaksanakan dengan baik oleh seluruh pihak. Terbukti dengan seluruh pelaksana mengetahui dengan baik apa yang menjadi pekerjaan dan tanggung jawabnya. Masyarakat yang mengetahui dari kader dan petugas puskesmas, kemudian petugas puskesmas yang memperoleh sosialisasi dari dinas kesehatan kabupaten, dan seluruh pelaksana mulai dari pemerintah pusat.

Komunikasi antara penyelenggara layanan dan penerima layanan juga berjalan dengan baik dalam seluruh rangkaian kegiatan. Mulai dari perencanaan, sampai dengan evaluasi program. Bahkan pihak puskesmas juga selalu siap sedia jika terdapat masyarakat yang memiliki penyakit serius, puskesmas bisa langsung memberikan rujukan. Sehingga tidak ada pihak yang merasa takut jika terjadi dampak dari program melalui

sosialisasi dan pengarahan yang diterima serta adanya komunikasi yang baik.

2. Sumber Daya

Sumber daya terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya informasi, sumber daya finansial, dan sumber daya wewenang dan sumber daya sarana prasarana. Sumber daya manusia yang menangani mengenai penyelenggaraan program JKN di Puskesmas Kasihan II sudah memenuhi jumlah dan kualifikasi seperti yang terdapat pada peraturan yang ada. Sumber daya informasi yang ada dalam implementasinya sudah mencukupi untuk penyelenggaraan program JKN.

Sumber daya finansial seluruhnya sudah diperoleh dari pusat, pihak puskesmas hanya mendistribusikan saja, sumber daya finansialnya sudah sesuai dengan yang diatur dalam peraturan yang ada. Sesuai yang tercantum dalam implementasi program JKN tersebut, sarana dan prasarana mengenai penyelenggaraan program JKN sudah disediakan lengkap dan didistribusikan dengan baik di puskesmas.

3. Disposisi

Implementasi program JKN ini mengenai disposisi atau watak dan karakteristik implementor sudah berjalan dengan baik. Implementor program JKN di Puskesmas Kasihan II mempunyai disposisi yang baik. Sehingga dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Implementor juga memiliki sikap atau perspektif yang sama dengan pembuat kebijakan sehingga proses

Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Kasihan II Tahun 2016-2017 sudah berjalan efektif.

4. Struktur Birokrasi

Standard Operating Procedures (SOP) salah satu aspek struktur penting dari setiap organisasi. SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak. Puskesmas Kasihan II menggunakan SOP sesuai dengan kegunaan pelayanan kesehatan di puskesmas.

B. Saran

Berdasarkan analisis hasil wawancara dengan responden di atas, terdapat saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan performa implementasi program JKN yang dilaksanakan di Puskesmas Kasihan II.

1. Bagi Puskesmas

- a. Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor yang ada di tingkat kecamatan guna memperoleh dukungan dalam pelaksanaan program JKN.
- b. Peningkatan manajemen program JKN, dengan cara melaksanakan pertemuan evaluasi berkala lintas program dan lintas sektor dengan menggunakan pemantauan wilayah setempat sebagai alat monitoring program.
- c. Membantu bidan meningkatkan keterampilan berkomunikasi dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat.
- d. Meningkatkan kualitas data JKN.

2. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

- a. Melakukan advokasi kepada pembuat dan pengambil kebijakan di tingkat daerah agar program JKN memperoleh dukungan politis dari para pengambil keputusan.
- b. Melakukan komunikasi rutin dengan pembuat kebijakan sebagai tindak lanjut advokasi.
- c. Monitoring dan evaluasi ditujukan kepada penyelenggara pelayanan, ketersediaan dana dan logistik, advokasi kepada pengambil kebijakan di setiap tingkatan, mobilisasi sosial dan penggunaan data JKN sebagai salah satu acuan perencanaan program yang akan datang.